

**PERANG KULAWI:
WILAYAH VORSTENLANDEN DI SULAWESI TENGAH
ABAD XX**

***KULAWI WAR:
THE VORSTENLANDEN AREA IN CENTRAL SULAWESI, XX
CENTURY***

Ismail Syawal

Pusat Penelitian Sejarah Universitas Tadulako
Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta Km. 9
Kota Palu - Sulawesi Tengah
e-mail: maield.thoratea@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v6i2.185

Naskah Diterima: 08 Juli 2020 Naskah Direvisi: 30 September 2020

Naskah Disetujui: 30 September 2020

Abstrak

Tulisan ini mengulas tentang beberapa peristiwa yang terjadi di daerah *Vorstenlanden* di Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yakni: 1) heuristik, 2) kritik sumber, 3) interpretasi, dan 4) historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah pada awal abad XX muncul perlawanan-perlawanan lokal, salah satunya perlawanan Towoalangi terhadap Belanda hingga penandatanganan nota perjanjian pendek (*korte verklaring*) di Kulawi. Towoalangi merupakan seorang Raja sekaligus sebagai simbol perlawanan masyarakat Kulawi terhadap kolonialisme Belanda awal abad XX. Perang ini adalah salah satu historiografi konflik antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat Kulawi. Oleh karena itu, peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses perjalanan sejarah Sulawesi Tengah.

Kata kunci: Towoalangi, Kulawi, *Vorstenlanden* dan Sulawesi Tengah.

Abstract

This paper analyzes several events in the Vorstenlanden area in Central Sulawesi. This study uses the historical method with four stages, namely: 1) heuristics, 2) source criticism, 3) interpretation, and 4) historiography. The results of this study indicate that in Central Sulawesi at the beginning of the twentieth century, local resistance emerged. One of which was the Towoalangi resistance against the Dutch and the signing of a short

agreement note (korte verklaring) in Kulawi. Towoalangi is a king as well as a symbol of the resistance of the Kulawi people against Dutch colonialism in the early twentieth century. This war is one of the historiographies of the conflict between the Dutch colonial government and the Kulawi people. Therefore, this event cannot be separated from the historical journey of Central Sulawesi.

Keywords: Towoalangi, Kulawi, Vorstenlanden and Central Sulawesi.

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah Sulawesi Tengah belum banyak merekonstruksi perkembangan sosial masyarakat Kulawi dan sekitarnya. Padahal kejadian dan peristiwa sejarah di wilayah Kulawi turut memberi andil dan mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di daerah Sulawesi Tengah. Keunikan yang terjadi di Kulawi menghiasi perkembangan sejarah Sulawesi Tengah, antara lain: sejarah politik, ekonomi, kebudayaan, agama, sosial, dan lain-lain. Sejarah Kulawi memiliki aspek-aspek tematik yang memadai untuk kita kembangkan dalam suatu historiografi lokal daerah Sulawesi Tengah. Demikian juga, perjalanan sejarah Kulawi dari masa ke masa (diakronis/memanjang waktu) sudah saatnya direkonstruksi apalagi di wilayah Kulawi terdapat tinggalan-tinggalan arkeologis yang penting bagi peradaban dan kebudayaan Sulawesi Tengah.

Sumber sejarah Kulawi terbukti memiliki endapan kejadian dan peristiwa tersebut di atas yang dapat dikatakan memadai. Tulisan Kruyt merupakan karya etnografi, berjudul “*De West-Toradjas Op Midden-Celebes*” dan Karya N. Adriani dan Alb.C. Kruyt berjudul “*De Bare’e-Sprekende Toradja’s van Midden-Celebes,*” banyak yang menganggap karya sejarah. Salah satu sumber penting lainnya pada perang Kulawi adalah ditemukannya pistol kolonial Belanda di Kulawi dan beberapa senjata tradisional masyarakat setempat sebagai bagian dari diorama sejarah Kulawi, Sulawesi Tengah umumnya.

Pada paruh awal abad XX di Sulawesi Tengah telah terjadi perubahan-perubahan penting dari tatanan masyarakat lama (tradisional) kepada tatanan masyarakat baru secara politik. Hal itu disebabkan oleh

intervensi dan aneksasi kolonial Belanda hingga ke daerah-daerah yang paling dalam dan terpelosok. Kerajaan-kerajaan besar di tingkat nasional maupun kerajaan-kerajaan kecil di tingkat daerah atau lokal turut ditundukkan secara politik dan militer sehingga penguasa-penguasa lokal terintegrasi dalam suatu sistem kekuasaan yang sifatnya baru sehingga muncul sebagai konsekuensi logis dari perubahan itu. Pembaharuan yang ditimbulkan oleh perubahan itu tidak serta merta dapat diterima dengan baik oleh penguasa-penguasa lokal dan terkadang mereka melawan, memberontak, dan melakukan perjuangan untuk membebaskan diri dari perubahan yang ditimbulkan oleh kolonial Belanda. Bentuk perlawanan, pemberontakan, dan sikap tidak mau bekerjasama tersebut menimbulkan suasana konflik antara kedua belah pihak sehingga integrasi Belanda dengan masyarakat lokal tidak berjalan dengan baik.

Perang Kerajaan Kulawi dengan Kolonial Belanda di awal abad XX merupakan bukti otoritas tradisional melawan pembaharuan yang dibawa oleh Kolonial Belanda. Pada satu sisi mereka mempertahankan harga diri maupun menunjukkan kedaulatan kerajaan lokal atas hegemoni Kolonial Belanda di Sulawesi Tengah. Sumber lokal terhadap perang ini membuktikan bahwa mereka telah memiliki kedaulatan territorial lokal yang patut dipertahankan. Namun, disisi lain sumber Kolonial Belanda menunjukkan legitimasi mereka ke Sulawesi Tengah adalah untuk melakukan pembaharuan wilayah maupun sistem pemerintahan modern. Hal yang menarik dari sumber mengenai kontinuitas sejarah sejak tahun 1900 hingga tahun 1942 adalah bahwa semakin solidnya integrasi politik Hindia Belanda (HB) di Sulawesi Tengah termasuk Kulawi dan semakin bervariasinya hambatan budaya dalam bentuk “gerakan rakyat” termasuk gerakan Towoalangi di Kulawi (Sadi dan Syawal, 2016: 1).

Keadaan seperti itu juga berkembang pada masa pendudukan Jepang dalam periode 1942-1945. Pada masa kemerdekaan 1945 hingga tahun 1971, terbentuknya “Negara” di tingkat lokal Sulawesi Tengah juga terjadi variasi lokal sebagai bentuk kearifan lokal yang menunjukkan bahwa ada dinamika

sejarah di tingkat lokal yang perlu dikaji secara terus-menerus terutama wilayah Kulawi.

Tulisan ini akan berusaha menampilkan kembali data lokal maupun data Belanda yang terkait dengan Perang Kulawi di awal abad XX. Ada beberapa wilayah yang melakukan perlawanan seperti Kulawi, yakni; Tatanga, Moutong, Mori, Sigi dan Napu sebagai bentuk legitimasi lokal bahwa kerajaan-kerajaan lokal memiliki variasi yang unik dalam melakukan perlawanan kepada Kolonial Belanda. Sebab-sebab timbulnya perlawanan itu beragam sekali tergantung situasi atau kondisi dan sikap penduduk setempat. Namun pada prinsipnya perlawanan yang ditimbulkan itu disebabkan bangsa asing yang datang berusaha untuk merampas dan menguasai hak serta kemerdekaan penduduk setempat yang telah mereka miliki sejak turun temurun. Perlawanan yang beraneka ragam itu pada hakekatnya terjadi pula di wilayah Mori yang memiliki kerajaan yang cukup besar (Kruyt, 1938: 374-375). Keseluruhan daerah yang melawan, mewakili distribusi masyarakat beragam sebagai bentuk perlawanan analisis historis perkembangan sosio-kultural yang melakukan di Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Metode sejarah yang dimaksud adalah mengacu kepada langkah-langkah *heuristic* (pencarian sumber), kritik sumber, *aufassung* (perumusan fakta), dan *darstellung* (penyajian pemikiran baru) sebagai suatu proses analisis sumber data (Hockett, 1955/1967: 9; Gardiner, 1952/1962: 65). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan politikologis. Menurut Kartodirdjo, pendekatan politikologis menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992: 4). Dalam hal pendekatan kajiannya digunakan konsep ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu politik. Kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber yang terkait dengan judul penulis, dilakukan di berbagai tempat seperti; Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil

penelusuran tersebut, penulis menemukan berbagai sumber yang meliputi buku, artikel, jurnal dan arsip.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini, diantaranya karya Sutrisno Kutoyo, tahun 2005 berjudul: *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, dan *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah* oleh Haliadi Sadi dan Ismail Syawal terbit tahun 2017. Buku ini dijadikan kerangka yang menyeluruh. Akan tetapi rinciannya dilengkapi dengan kontrak-kontrak perjanjian antara Kulawi dengan Belanda (Pemerintah Kolonia) Hindia Belanda. Selain itu, secara metodologi, sumber buku itu harus dicocokkan dengan sumber-sumber arsip, karena sebagian berdasar dari tradisi lisan. Artikel sezaman yang diterbitkan oleh majalah masa kolonial Belanda juga digunakan sebagai sumber.

Setelah semua sumber terkumpul, dilakukan kritik sumber, yakni menyaring atau menyeleksi setiap sumber sejarah yang berkaitan dengan Kulawi. Kritik sumber ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu; kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentitas atau keaslian suatu sumber yang meliputi waktu penulisan, penulisnya, dan lain sebagainya. Adapun kritik intern untuk mendapatkan sumber yang memiliki tingkat validitas atau keakuratan yang tinggi, khususnya terkait isi atau kandungan suatu sumber. Melalui tahapan kritik inilah penulis menetapkan sumber yang dianggap kredibel terkait pokok bahasan penulis terkait Kulawi. Selanjutnya adalah interpretasi (penafsiran) untuk menyimpulkan sejumlah sumber yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik. Pada tahapan ini, penulis mencoba menghubungkan beberapa sumber terkait informasi seputar Kulawi. Terakhir adalah historiografi, yakni penyajian hasil penelitian sesuai dengan ketentuan penelitian sejarah dan penulisan yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Keadaan Geografis

Kulawi adalah sebuah kecamatan yang memiliki luas wilayah 1.053,56 km² terletak ± 71 km di sebelah Selatan kota Palu (Kabupaten Sigi dalam Angka, 2020: 8). Pada tahun 1930, penduduk *Landschap* Kulawi sebanyak 11.114 jiwa yang terdiri dari 11.074 penduduk bumiputera, 1 Eropa dan 39 Cina (*Volkstelling* 1930, 1936: 134). Kulawi sebagai daerah pedalaman (*Hinterland*) ini merupakan hamparan tanah dataran tinggi subur Momi sekaligus pintu gerbang yang menghubungkan antara Kulawi dengan daerah sekitarnya. Selain itu, Kulawi diapit oleh pegunungan yang dipagari hutan lebat serta memiliki beberapa aliran sungai, seperti; Sungai Koro, Sungai Miu, Sungai Mewe, Sungai Sore, Sungai Tuwa, dan Sungai Adale dan Danau Lindu (Sadi dan Syawal, 2016: 17).

Secara geografis Kulawi berada posisi 1°20'18"-1°43'22" LS dan 119°4'04"-120°07'53"BT. Kecamatan Kulawi adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang memiliki batas-batas wilayah antara lain: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Lindu; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Poso; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sadi dan Syawal, 2016: 16).

Kulawi terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Sigi, dengan jarak ± 62 Km dari ibu kota kabupaten. Untuk sampai di ibu kota kecamatan dan beberapa desa dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat, namun terdapat lima desa yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua/motor ojek pada musim kemarau melalui jalan setapak sedangkan pada musim hujan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kulawi terdiri dari 16 desa, antara lain: Winatu, Towulu, Siwongi, Banggaiba, Rantewulu, Lonca, Boladangko, Sungku, Toro, Mataue, Bolapapu, Namo, Tangkulowi, Salua, Poleroa Makuhi, dan Marena (Sadi dan Syawal, 2016: 17).

Kecamatan Kulawi pada umumnya merupakan daerah pegunungan, dan berada pada sepanjang aliran Sungai Lariang yang terletak pada ketinggian kurang lebih 500-1000 meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanah cukup curam yaitu berkisar antara 60%-70% dan bahkan ada yang mencapai di atas 80%. Persentase ketinggian desa-desa di atas permukaan laut yakni 0-500 meter sebanyak 21,42% dan 501-1000 meter sebanyak 78,58% (Kecamatan Kulawi dalam Angka 2015).

Kulawi: Kerajaan Kecil di Sulawesi Tengah

Kulawi adalah sebuah kerajaan yang berdaulat dan peletak dasar terbentuknya sistem komunal sebagai daerah adat yang dibentuk oleh Kodomo, penemu Kayu Kulawi (Kau Ngkulawi). Sejak itu, kepemimpinan diatur oleh *Totua Ngata* dan *Totua Ada'* yang dipercaya oleh masyarakat umum atau *To Ndea*. *Totua Ngata* dan *Totua Ada'* memiliki petugas masing-masing, yaitu *Padaho*, *Galara*, *Tadulako*¹ yang mengatur wilayah Topo Moma, Topo Umaria, Topo Tado, Topo Ompa atau Tobaku, dan Topo Uma² Ree Owi (Pamei, 2006: 2). Semua wilayah tersebut memiliki bangsawan masing-masing yang memiliki keturunan hingga kini. Raja pertama adalah seorang perempuan bernama Hangkalea yang menentang pemerintah kolonial Belanda kemudian dilanjutkan oleh adiknya Towoalangi.

Pada abad XVIII, Kulawi memiliki pemimpin perempuan bernama Hungkalea. Menurut *Totua Ngata*, sejak beberapa abad lalu orang Kulawi telah memiliki seorang figur pemimpin perempuan yang fungsinya sama dengan *Totua Ngata*. Seorang perempuan yang memangku jabatan tersebut diberi gelar *Tina Ngata* (Ibu Kampung). Keberadaan *Tina Ngata* bukan hanya

¹ *Tadulako* adalah julukan bagi setiap orang yang berhasil menonjolkan dirinya dalam menyelamatkan integritas dan keutuhan negerinya, karena itu ia menempatkan dirinya sebagai orang yang terpercaya dan di andalkan oleh kerajaan dalam melaksanakan misi negerinya dengan sifat-sifat utama, yakni: keberanian, keperkasaan dan kesaktian yang dimiliki dan diakui oleh komunitas kecilnya dalam melaksanakan peranannya untuk membela negerinya (baca: Chalid dan Hali, 1981: 53).

² Masyarakat Topo Uma hingga sekarang masih sangat memegang nilai-nilai gotong royong dan memelihara sifat kekeluargaan yang tinggi. Hal ini terlihat dari warga ketika mendirikan rumah di kerjakan dengan cara gotong-royong. (baca: Yulia, Fahri, dan Ramadanil, 2017: 7).

dihormati oleh warga Ngata tetapi juga Ngata yang ada di sekitarnya (*Tongki Ngata*). Sosok Tina Ngata yang cukup populer hingga kini bahkan sangat disegani oleh Belanda adalah Hungkalea. Konsep ini ternyata mampu membendung langkah kaki kaum penjajah. Persatuan dan kesatuan (*hintuvu*) antara rakyat, *Totua Ngata* dan *Tina Ngata* serta para pemimpin saat itu yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat merupakan senjata paling ampuh dalam melakukan perlawanan. Selain Hungkalea, masih ada beberapa Tina Ngata lainnya, seperti Lingkumene, Tobanawa, dan Ngkamumu.

Pada masa Hangkalea menjabat sebagai *Magau* Kulawi, posisi Towoalangi menjadi seorang *Tadulako* untuk memimpin perang. Menurut Kamus Kaili Ledo “*tadulakon* panglima perang, kepala tentara, pahlawan. *Warrior, hero, military leader*” (Evans, 2003: 225). *Tadulako* secara historis juga hadir dalam fenomena historiografi (penulisan sejarah Sulawesi Tengah) dari masa ke masa. Tokoh sejarah sebagai *Tadulako* di kerajaan-kerajaan di wilayah masyarakat Kaili Sulawesi Tengah antara lain *Tadulako Umana Soli* dari Napu, *Mantaili* dari Lando Bulili, *Lasoso* dari Biromaru, *Amir Kasa* dari Tatanga, *Songgo Langi Bone Tatura*, *Mangge Rante* dari Enu, *Towoalangi* dari Kulawi.

Secara tradisional, Kulawi mempunyai konsep struktur sosial yang terdiri dari lima golongan, yaitu:

1. Golongan *Madika* atau *Maradika*. Golongan ini terdiri atas para raja dan bangsawan atau “elit” yang mempunyai hak istimewa. Keistimewaan *Maradika* mempunyai peran dan wewenang, yakni: (1) Mengatur hubungan *Ngata* dengan *Ngata* lain yang disebut “*Hintuvu Ngata*”, (2) Menentukan perang dengan *Ngata* lain, dan (3) Membuat keputusan terakhir. Apabila ada masyarakat yang membuat pelanggaran, dan pelanggaran tersebut setelah melalui rapat *Totua Ngata* menetapkan keputusan orang tersebut dijatuhi hukuman mati, maka jalan keluar yang ditempuh *Maradika* untuk menyelamatkan orang yang di jatuhkan hukuman mati tersebut ialah “*Ratolo*” (ditebus) dengan hewan jika persoalan yang

dia lakukan masih bisa di tolerir. Masa sekarang, fungsi *Maradika* di dalam *Ngata* dipegang oleh kepala *Ngata*.

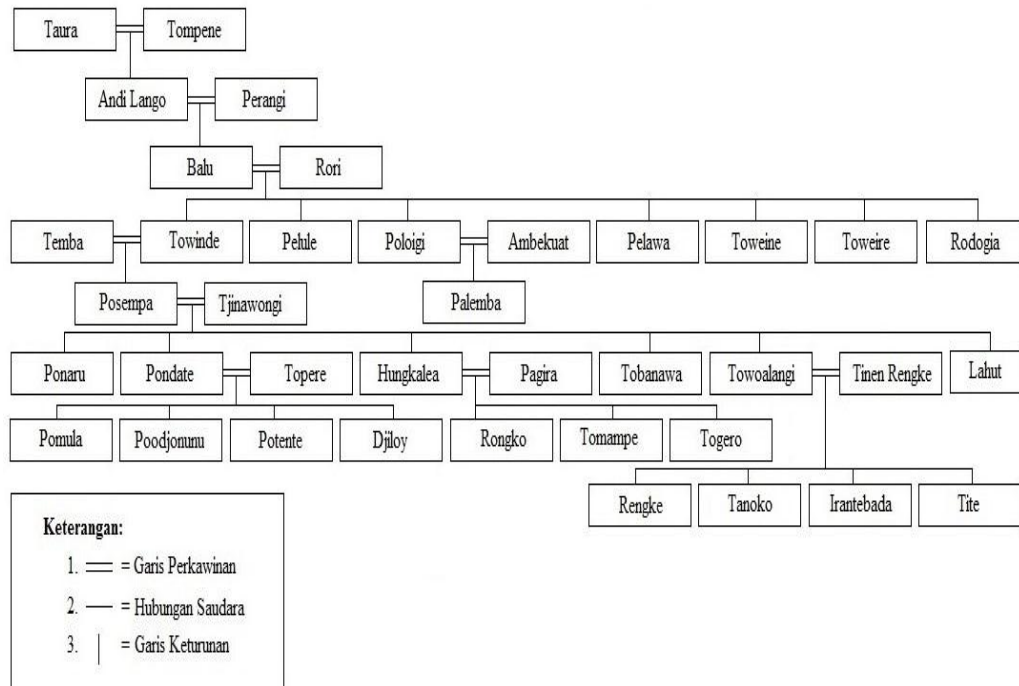
2. Golongan *Totua Ngata* terdiri atas: penasehat agama, rohaniawan, dan ketua adat (yang mempunyai kekuasaan dibidang agama dan adat). Selain itu, *Totua Ngata* membunhya peran dan wewenang, antara lain: (1) Mengatur dan mengawasi aturan adat yang disepakati dalam *Polibua* / musyawarah; (2) Menyelesaikan perselisihan antar *Boya*; (3) Mengatur pelaksanaan perkawinan adat, serta menentukan besar kecilnya mas kawin menurut “*Lari Wati*” (keturunan) dari keluarga yang bersangkutan; (4) Memimpin sidang atau *Polibu* menyangkut penyelesaian perselisihan pada tingkat *Boya* dan *Ngata*; (5) Menentukan besar kecilnya sanksi “*Givu*” atau denda adat atas pelanggaran; (6) Memimpin dan mengarahkan *Totua-totua Boya* dalam *Ngata* menyangkut evaluasi kembali aturan-aturan yang ada atau merubah dan membuat peraturan adat yang baru; (7) Menjadi panutan; (8) Memimpin dan melaksanakan setiap upacara adat; dan (9) Memilih pemuda sebagai *Tondo Ngata* untuk dipersiapkan menjadi prajurit perang dan pengawasan wilayah adat.
3. Golongan *Tina Ngata* yang memiliki peran dan wewenang, antara lain: (1) Perancang pekerjaan dalam pertanian, karena yang banyak mengetahui dengan teliti ilmu perbintangan di langit untuk dijadikan pedoman dalam bercocok tanam adalah perempuan utamanya *Tina Ngata*. Oleh karena itu, *Maradika* dan *Totua Ngata* mendengar penjelasan dari *Tina Ngata*, kemudian kesepakatan tersebut baru disampaikan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan pertanian, seperti menabur bibit, menanam, termasuk membuka lahan yang dijadikan kebun; (2) Pendingin, artinya sebagai juru damai jika ada konflik dalam *Ngata*, biasanya perempuan maju sebagai juru damai; dan (3) Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam forum adat. Kehadiran seorang *Ntina Ngata* dalam setiap musyawarah atau pertemuan merupakan sebuah keharusan. Ketidak hadirannya dapat mengakibatkan keputusan yang

sudah diambil menjadi batal (tidak sah). Bentuk pertemuan yang demikian mewajibkan kehadiran seluruh unsur Ngata tanpa terkecuali yang disebut *Hintuvu Libu Ngata*. Fungsi seorang *Tina Ngata* dalam kesehariannya selain yang disebutkan di atas, juga dapat menyelesaikan segala bentuk persoalan baik bersifat internal, maupun eksternal, dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan para *Totua Ngata*. Jika konflik yang timbul tidak dapat diselesaikan secara internal Ngata, kehadiran para *Tina Ngata* dan *Totua Ngata* yang berasal dari *Tongki Ngata* sangat diperlukan.

4. Golongan *Ntodea* yang terdiri atas kalangan masyarakat pekerja, petani, penduduk umum, baik di kota maupun di desa atau dapat dikatakan golongan rakyat jelata.
5. Golongan *Batua* yang terdiri atas tawanan perang, budak dan mereka yang dianggap sebagai penghinaan. Penggolongan lapisan sosial tradisional ini, khususnya golongan kelima (batua) sudah lama dihapus oleh kesadaran masyarakat setempat. Meskipun demikian, secara tradisional masyarakat Kulawi sekarang masih mengakui status sosial golongan *Madika* dan *Tetua Ngata*, misalnya dalam hal yang berhubungan dengan masalah-masalah tatakrama (etik), adat istiadat yang sudah melemah, namun dalam proses pengembangan sosial di Kulawi sekarang tidak ada lagi foedalisme (Ma'mun, t.t.: 24-27).
6. Golongan tersebut memiliki peranan penting dalam mengakomodir persoalan melalui dewan adat. Salah satu tempat yang menjadi pusat urusan adat istiadat, pemerintahan dan budaya adalah bangunan *Lobo*. *Lobo* memiliki tiga fungsi, yaitu: 1) untuk musyawarah, perumusan, dan pengambilan kebijakan menyangkut kepentingan publik serta mengakomodasi segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, khususnya bagi para pemegang tampuk pemerintahan (*Maradika*), *Totua Ngata* (sesepuh), pengurus adat anggota dan tokoh masyarakat. 2) sebagai gedung pengadilan, apabila seseorang melanggar hukum adat, maka dia akan diadili dan disiksa di dalam *lobo*. 3) tempat

upacara adat yang biasanya ditandai dengan prosesi penyembelihan hewan seperti kerbau dan lain-lain.

Secara vertikal, Lobo ditata menjadi tiga bagian berdasarkan golongan, yakni (1) pada bagian bawah lobo adalah tempat umum atau pendengar yang hadir, (2) bagian tengah adalah tempat makan (*Padence*). (3) Di atas *bantalan*, terdapat dapur kecil (*puavhua*) sejajar dengan panggung bulat kecil yang berhubungan langsung dengan tembok disebut *Palangka*, khusus bagi para bangsawan dan *Totua Ngata* (Yusran dan Suryasari, 2016: 189).



Gambar 1:
Silsilah Towoalangi: Bangsawan Bolapapu di Kerajaan Kulawi
(Sumber: Sadi dan Syawal, 2016: 128)

Kulawi: Wilayah Vorstelanden Sulawesi Tengah

Awal abad XX, Kulawi masih memperlihatkan karakteristik yang menarik. Kekuasaan raja di Kulawi sama halnya dengan raja-raja lainnya di Sulawesi Tengah yang berkuasa. Kekuasaan dari penguasa di Kulawi masih bersifat tradisional seperti yang dikatakan oleh Wertheim, (1956: 115) bahwa:

“As a role the position of the chief in the small communities, both territorial and genealogical, was not one of authoritarian command but rather one of *primus inter pares*”. Posisi pemimpin dalam komunitas kecil, baik dalam komunitas atas dasar territorial atau genealogis, bukan merupakan pimpinan yang otoritarian, tetapi lebih merupakan *primus inter pares* (yang terbaik diantara yang baik). Inilah ukuran demokrasi yang ada dalam struktur inheren masyarakat tradisional Indonesia termasuk di Kulawi³.

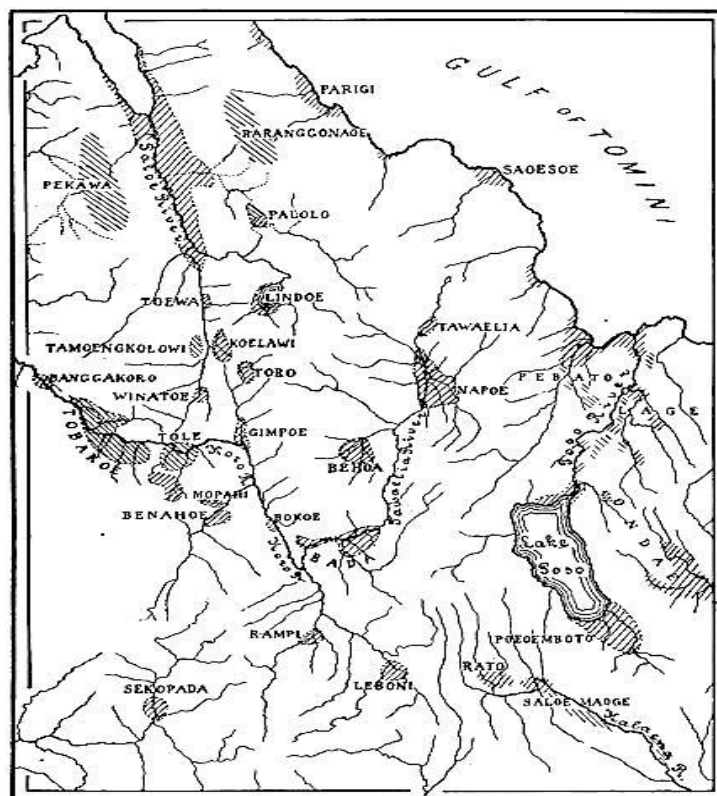
Keadaan itu membuktikan bahwa pengaruh kekuasaan lama atau tradisional di Kulawi masih sangat kental dan tidak bisa disepelekan dalam perkembangan sejarahnya. Jadi, Kekuasaan Towoalangi yang diperoleh dari penguasa sebelumnya merupakan bentuk “*primus inter pares*” dari masyarakat Kulawi. Otoritas tradisional yang diperoleh Towoalangi secara adat dalam peradaban dan kebudayaan harus dipertahankan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Namun, dalam perkembangannya Kulawi dibawah bayang-bayang kekuasaan Kerajaan Sigi yang memiliki seorang tokoh andalan dari Kulawi bernama Pole (Abdullah [ed], 2005: 23). Kekuasaan Sigi di Sulawesi Tengah pada dasarnya dianggap oleh Belanda sebagai pusat penguasa territorial di Sulawesi Tengah, sehingga Kulawi selalu memberikan upeti kepada Raja Sigi.

Pengaruh Hindia Belanda di Sulawesi Tengah pada awal abad XX dapat dilihat dari sistem politik dan kekuasaan terutama pemerintahan legal rasional dari Eropa. Sistem pemerintahan dapat dilihat dari pembagian wilayah kekuasaan. Pemerintah Hindia Belanda membagi daerah menjadi dua bagian utama yakni daerah yang dikontrol langsung (*Rechtsreeksbestuursgebied* atau *Governementslanden*) dan daerah yang tidak langsung dikontrol (*Zelfbestuurslandschappen* atau *Vorstelanden*). Daerah

³ Kulawi adalah salah satu dari 12 suku bangsa di Sulawesi Tengah yang diakui, seperti Suku Tomini, Kaili, Pamona, Lore, Mori, Bungku, Saluan, Balantak, Banggai, Tolitoli, dan Buol. Suku Kulawi merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah. Kekayaan adat istiadat dan budaya yang sangat beragam sebagai ciri khas tersendiri, khususnya dari segi bahasa dan kebiasaan, sama halnya dengan masyarakat lainnya di Indonesia. (Baca: Septiwiharti, Maharani, dan Mustansyir, 2019: 223; Arham, Khumaidi, dan Pitopang, 2016: 14).

yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi *afdeelingen* dan sub bagiannya *onderafdeelingen*. *Afdeelingen* dipimpin langsung oleh seorang controleur Belanda tetapi yang memerintah adalah seorang Bupati. Bupati adalah seorang penguasa baru yang dibuat oleh Belanda untuk menggantikan posisi *Mokole, Magau, Karaja, Datu, Kabosenya*, sebagai penguasa tertinggi tradisional di wilayah Poso. Bupati inilah yang menguasai keseluruhan *Regentchaapen* (Kabupaten), (Ahimsa, 1991: 37).

Pada surat Residen Manado tanggal 17 Juli 1909 Nomor 3546 *Afdeeling* Sulawesi Tengah dibagi menjadi enam wilayah, yaitu *onderafdeeling* pantai barat, Palu, Parigi, Poso, Banggai, dan Tobungku. Kulawi masuk dalam *Onderafdeeling* Palu dibawah seorang controleur yang berkedudukan di Palu (untuk sementara pada tahun 1909 diduduki oleh seorang *Civiel en militair gezaghebber*) dan untuk membimbing penguasa pribumi di wilayah ini ditempatkan seorang asisten pribumi sebagai pembantu controleur. Dalam catatan tersebut dinyatakan “di daerah pegunungan ini ditempatkan seorang *civiel gezagheber*, mungkin dengan Lemo di Kulawi sebagai tempat kedudukannya.” Secara normatif, posisi Kulawi dianggap sebagai wilayah yang dikuasai secara langsung. Tetapi secara *de facto* Kulawi adalah *vorstenlanden*.



Gambar 2:
Peta Wilayah Kulawi 1920-an.
(Sumber: Kaudern, dalam Sadi dan Syawal, 2016: 18).

Perang Kulawi: Sebuah Gerakan Sosial

Perang ini disebut perang “Bulu Momi” (Bulu = Gunung, dan Momi = Potong). Perang Kulawi melawan Belanda dibawah pimpinan Opsir van Offen berlangsung tahun 1904-1905. Dalam perang tersebut, pasukan Kulawi kurang lebih 1.500 orang dipimpin oleh Towoalangi. Mengenai jumlah pasukan yang terlibat dalam perang tersebut terdapat beberapa versi, misalnya menurut Jore Pamei, jumlah tentara Kulawi waktu itu sebanyak 500 orang, sedangkan menurut buku Djawatan Penerangan Kabupaten Donggala perang tersebut melibatkan sebanyak 1.500 orang pasukan Kulawi (Sadi dan Syawal, 2017: 308).

Sebenarnya Belanda telah melakukan penyerangan, namun tidak berhasil memasuki wilayah Kulawi karena wilayah Kulawi sulit dijangkau tentara Belanda pada waktu itu. Selain belum ada jalan resmi ke Kulawi,

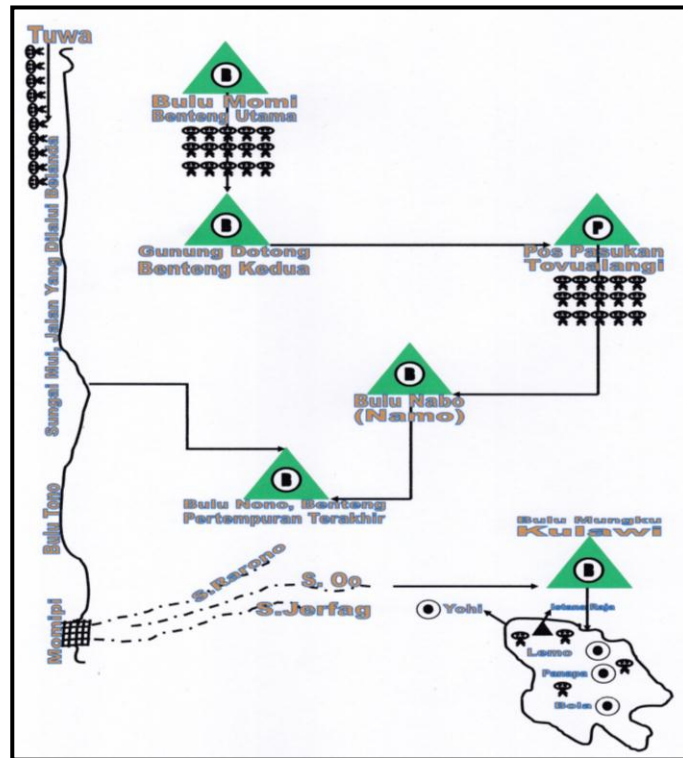
wilayah ini juga memiliki medan yang berliku-liku dan jurang-jurang yang dalam (Masyhuda, 1982/1983: 89-91). Di tempat-tempat yang strategis inilah, masyarakat melakukan penghadangan terhadap tentara yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda dari Palu. Benteng pertahanan masyarakat Kulawi dipilih di Gunung Momi yang dilengkapi dengan senjata api berjumlah 500 pucuk ditambah dengan senjata tradisional lainnya seperti tombak, guma (parang), keris, sumpit, dan onggokan batu-batu besar untuk digelindingkan (Sadi dan Syawal, 2016: 169).

Sejak tahun 1904, tentara Belanda melakukan penyerangan ke Kulawi dengan basis pertahanan di Tuwa dan Gunung Momi di pihak Kulawi. Perebutan Kulawi oleh tentara Kolonial Belanda dilakukan selama kurang lebih tiga bulan. Pimpinan tentara Belanda menjadikan Ince Muhammad dari Palu sebagai penunjuk jalan menuju Tuwa kemudian Madika Tuwa bernama Jaraba dijadikan sebagai penunjuk jalan untuk memasuki Kulawi. Jaraba sebagai Madika Kulawi tidak mau menjadi penunjuk jalan, namun disiksa dengan cara dipanggang, sehingga dia menyetujui keinginan Belanda untuk menjadi penunjuk jalan (Sadi dan Syawal, 2016: 170). Jalan yang dilalui oleh Belanda melewati Sungai Miu menuju ke hulu hingga melewati Kampung Betaha di Kulawi. Pasukan Kulawi yang bertahan di Pedoa sebanyak kurang lebih 70 orang dapat dipatahkan oleh pasukan Belanda yang diperkuat oleh bantuan dari Palu dan Manado. Pasukan Belanda yang lainnya melakukan penyerangan ke pasukan Kulawi yang berada di Gunung Momi, sehingga pasukan Belanda yang menuju Kulawi melalui sungai Miu tidak dapat dihalau (Masyhuda, 1982/1983: 89-91).

Pada tahun 1904 Towoalangi melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Kulawi yang dipimpin oleh Towoalangi adalah sikap mempertahankan harga diri bangsa Kulawi dengan membuat pertahanan di Gunung Momi. Penyerangan Belanda dari pusat kekuasaan di Palu selalu dilakukan ke Kulawi, namun sering gagal karena medan yang sulit ditempuh dan tidak adanya kerjasama yang diperlihatkan oleh penduduk lokal waktu itu. Dua orang utusan Belanda dari Palu, yakni

Lamarauna (Raja Banawa) dari Donggala dan Yojokodi (Raja Palu) gagal membujuk Towoalangi untuk tunduk kepada Belanda. Ajakan kedua pembesar Sulawesi Tengah yang lebih awal tunduk kepada Belanda ditolak oleh Towoalangi. Hal itu menunjukkan bahwa secara teritorial tidak ada lagi kekuasaan kerajaan yang terpusat seperti kerajaan Sigi masa itu (Sadi dan Syawal, 2016: 166-167).

Pada tahun 1905, pasukan Belanda berhasil memasuki ibukota Kerajaan Kulawi melalui Sungai Miu. Tentara Belanda juga menggunakan simbol-simbol tradisional untuk menghentikan pertentangan atau peperangan dengan menaikkan bendera putih sebagai simbol diakhirinya pertentangan. Bendera putih oleh orang Kulawi disebut '*tobula*' yang terbuat dari kulit kayu dan dijadikan kain. Kurir dan tentara Belanda setelah berada di Kulawi yang ditemui hanya ada dua orang yakni Raja Towoalangi dan Mekuasa di istana kerajaan. Kurir Belanda yang menemui raja Towoalangi bernama Yojobula dan Yojovuri dari Palu. Ancaman Belanda disampaikan oleh kedua kurir tersebut kepada Towoalangi 'kalau tidak menyerah kepada mereka, Belanda membunuh semua keluarga raja dan membakar ibukota Kulawi' (Masyhuda, 1982/1983: 89-91). Akhirnya Towoalangi menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi keluarga dan rakyat Kulawi.



Gambar 3:
Sketsa penyerangan Benteng Petahanan Towoalangi dan Rakyat Kulawi

Akibat tunduknya Towoalangi kepada Belanda, dibuatlah naskah perjanjian pendek untuk mengatur hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. Penandatanganan perjanjian dan kontrak tersebut merupakan langkah strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk mengikat kerajaan-kerajaan yang berhasil ditundukkan, salah satunya Towoalangi (Raja Kulawi) yang menandatangani *Korte Verklaring* pada tanggal 30 November 1908. Kontrak ini diperbarui oleh Raja Tomampe alias Tomai Masi 6 Desember 1917, dan terakhir Djiloi 8 April 1921 (Kutoyo, 2005: 105-106).

Konsekuensi akhir dari penandatanganan perjanjian pendek tersebut, sistem kekuasaan Hindia Belanda mau tidak mau harus menggantikan sistem kekuasaan lama yang telah berkuasa sejak dahulu. Pembagian wilayah kekuasaan kemudian diperbaharui pada tahun 1918 yang berkuasa di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dan kemudian mendapat pembaharuan kembali pada tahun 1924 dengan membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi dua

afdeeling, yakni *afdeeling* Poso dan *afdeeling* Donggala (Sadi dan Syawal, 2016: 182).

Wilayah *Afdeeling Midden Celebes* sejak tahun 1905 masuk dalam wilayah Keresidenan Manado dibawah kekuasaan seorang *Asisten Residen*. Asisten Residen *Afdeeling Midden Celebes* berkedudukan di Donggala. Adapun wilayah yang dibawah ini antara lain: (1) Wilayah Teluk Palu yang terdiri atas daerah Palu, Sigi, Biromaru, Dolo-Rindau, Dolo-Kaleke, Banawa atau Donggala, Tawaeli dan daerah sekitarnya serta daerah langsung di Donggala di bawah seorang *Civiel Gezaghebber* dengan berkedudukan di Donggala. (2) Wilayah Tolitoli yang terdiri atas daerah ini dan daerah Tolitoli yang diperintah langsung serta tanah jajahannya yang termasuk daerah ini dibawah seorang *Civiel Gezaghebber* dengan berkedudukan di Kampung Baru. Teluk Tomini yang terdiri atas daerah Moutong, Sigenti, Kasimbar, Toribulu, Ampibabo, Parigi, Sausu, Poso, Toko, dan Kepulauan Togeian serta Una-Una dan Mapane dibawah seorang Kontrolir pemerintahan dengan kedudukan di Poso, yang membawahi juga daerah Parigi, Ampibabo, Toribulu, Kasimbar dan Sigenti dibawah pejabat pribumi setempat dengan kedudukan di Parigi; atas daerah Ntojo diangkat seorang pribumi dengan kedudukan di Tojo, atas kepulauan Togeian serta Una-Una ditempatkan seorang pejabat pribumi yang berkedudukan di Una-Una (Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 18, Buitenzorg, 19 Desember 1904).

Pada Lembaran Negara Hindia Belanda Nomor 27 dan keputusan pemerintah Nomor 21, tanggal 14 Januari 1907 dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Tengah baru mencakup enam wilayah, yaitu Banawa, Tawaeli, Palu, Biromaru, Sigi, dan Dolo. Tahun 1907 ini, Kulawi masih bebas dari kekuasaan Hindia Belanda. Berdasarkan Besluit pemerintahan Hindia Belanda tanggal 30 Juni 1908 nomor 36 *Afdeeling Midden Celebes* (Sulawesi Tengah) terdiri atas: 1). *Onderafdeeling Westkust van Midden Celebes* terdiri atas Banawa, Tawaeli, dan Tolitoli. 2). *Onderafdeeling Paloe* terdiri atas Paloe, Beromaroe, Sigi, Dolo, Koelawi,

Tole, Benasoe, Tobokoe, Kantewoe, dan Banggaiba. 3). *Onderafdeeling* Poso terdiri atas Todjo, Lage en Rano, Pebato, Napoe, Besoa, Tawaelia, dan Oena-Oena en de Togeian Eilanden. 4). *Onderafdeeling* Parigi terdiri atas Parigi, Toriboeloe, dan Mooetong.

Perubahan pembagian wilayah dari tahun 1907 ke tahun 1908 antara lain: Hindia Belanda membagi Sulawesi Tengah menjadi lima *Onderafdeeling*, yakni: *Onderafdeeling* Donggala, *Onderafdeeling* Paloe, *Onderafdeeling* Tolitoli, *Onderafdeeling* Parigi, dan *Onderafdeeling* Poso (Nadjamuddin, 2002: 107). Pada masa ini, Sulawesi Tengah dijadikan satu *Afdeeling*. Antara tahun 1903-1918 terbagi ke dalam lima *Onderafdeeling* tersebut. Setelah tahun 1924, Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua bagian yakni: *Afdeeling* Donggala dan *Afdeeling* Poso. *Afdeeling* Poso terbagi lagi menjadi tiga *Onderafdeeling*, antara lain: *Onderafdeeling* Tojo, *Onderafdeeling* Pamona, *Onderafdeeling* Lore dan Una-Una, *Onderafdeeling* Kolonodale menaungi Mori dan Bungku; *Onderafdeeling* Banggai menaungi Banggai Kepulauan dan Banggai Daratan. *Onderafdeeling* Donggala terdiri atas; *Onderafdeeling* Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitoli. *Onderafdeeling* Palu meliputi; *Landschaap* Palu, Sigi-Dolo, dan Kulawi.

PENUTUP

Uraian mengenai Perang Kulawi, sejak munculnya pengaruh kekuasaan Kolonial Belanda di Sulawesi Tengah pada awal abad ke 20 ditandai oleh sistem politik dan kekuasaan sebagai sistem pemerintahan legal rasional yang dibawa dari Eropa. Sistem pemerintahan tersebut dapat dilihat dari pembagian wilayah kekuasaan Hindia Belanda di Sulawesi Tengah. Wilayah kekuasaan Hindia Belanda membagi daerah menjadi dua bagian utama, yakni daerah yang dikontrol langsung (*Governementslanden*) dan daerah yang tidak dikontrol langsung (*Vorstelanden*). Daerah yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi *afdeelingen* dan sub bagiannya *onder afdeelingen*.

Pada tahun 1904 terdapat tokoh lokal yang melakukan perlawanan di Kulawi karena tidak menyetujui masuknya Kolonial Belanda di wilayah tersebut. Tokoh itu ialah Towoalangi atau dikenal dengan panggilan Toi Torengke. Upaya Belanda untuk menaklukkan wilayah *Vorstenlanden* atau wilayah yang secara tidak langsung dikuasai seperti Wilayah Kulawi sangat gigih dilakukan dengan mengutus Raja Palu untuk membujuk penguasa Kulawi.

Perang Gunung Momi menurut kedua belah pihak telah memakan korban baik itu terjadi luka-luka maupun korban meninggal. Menurut Laporan Kolonial Belanda (*Kolonial Verslag*) bahwa penyerangan pada tanggal 14 dan 17 Desember 1905 dinyatakan gagal untuk menyerang pasukan Kulawi di Gunung Sadaunta dan Gunung Momi, Namun, setelah itu berhasil memasuki daerah Kulawi pada tanggal 18 Januari 1905 dengan pasukan tambahan dari Makasar.

Pada akhirnya, di paruh akhir Januari 1905 semua bangsawan daerah Kulawi tunduk kepada kekuasaan Kolonial Belanda. Takluknya Kulawi secara resmi tahun 1908 yang ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) dengan menambah wilayah Kulawi sebagai salah satu daerah kekuasaan Kolonial Belanda di Sulawesi Tengah. Setelah wilayah Kulawi, menyusul Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) yang ditandatangani oleh Kabo dari Raja Pekurehua dari Napu, pada tahun 1907 yang termasuk daerah *Vorstenlanden* dari daerah Poso. Dua wilayah ini dapat menjadi ukuran keberhasilan Kolonial Belanda dalam menaklukkan Sulawesi Tengah di awal abad ke-20.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kiesman (ed.), 2005. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop. Sulteng.
- Ahimsa Putra, Heddy Shri, 1991. "Hambatan Budaya dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abd Ke-19," *Buletin Antropologi*, No. 16 tahun VII/1991.
- Arham, Suhendar, Khumaidi, Akhmad, dan Pitopang, Ramadhanil, "Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Obat Tradisional dan Pemanfaatannya Pada Suku Kulawi di Desa Mataue Kawasan Taman Nasional Lore Lindu". *Jurnal Biocelebes*, Vol. 10 No.2, Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sigi dalam Angka*, tahun 2020.
- BPS Kabupaten Sigi, *Kecamatan Kulawi dalam Angka*, tahun 2015.
- Evans, Donna, 2003. *Kamus Kaili-Ledo, Indonesia Inggris*, Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
- Gardiner, Patrick. 1952/1962. *The Nature of Historical Explanation*. New York: Oxford University Press.
- Hi. Chalid, Syamsuddin dan Hali, Abdul Gani, 1981. *Tadulako dalam Persepsi dan Konsep Budaya Komunitas Kecil Suku Kaili dan Suku Kulawi di Kabupaten Donggala*, Palu: Balai Penelitian Universitas Tadulako.
- Hockett, Homer Carey. 1955/1967. *The Critical Method in Historical Research and Writing*. New York: The MacMilland.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kruyt, Alb. C., 1938. *De West-Toradjas op Midden Celebes Deel I*, Amsterdam: Uitgave van de N.V. Noord-Hollansch.
- Kutoyo, Sutrisno, 2005. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Ma'mun, *Upacara 'Merapi Uda' Suku Kulawi*, Skripsi pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu, Tidak diterbitkan.

- Masyhuda, Masyhuddin, 1982/1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Depdikbud.
- Nadjamuddin, Lukman, 2002. *Dari Animisme ke Monotheisme, Kristenisasi di Poso 1892-1942*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Pamei, Yore, Sejarah Kekerabatan Ka Magaua To Kulawi, Disampaikan pada Libu Bohe (Musyawarah Besar) Majelis Adat Momepanimpu Kulawi, Pada Bulan Juni 2006.
- Sadi, Haliadi dan Syawal, Ismail, 2016. *Sejarah Pahlawan Lokal (Towoalangi di Kulawi) Kabupaten Sigi*, Palu: Hoga.
- Sadi, Haliadi dan Syawal, Ismail, 2017. *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah*, Palu: Hoga.
- Septiwiharti, Dwi, Maharani, Septiana Dwiputri, dan Mustansyir, Rizal. "The Concepts of Nosarara Nosabatutu In The Kaili Community: Inspiration For Religious Harmony In Indonesia". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 4, 2 (2019).
- Staatblad* tahun 1907 nomor 27 dan *Besluit* Pemerintahan Hindia Belanda, tanggal 30 Juni 1908 nomor 36 *Afdeling Midden Celebes* (Sulawesi Tengah).
- Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 18, Buitenzorg, 19 Desember 1904.
- Surat Residen Manado tanggal 17 Juli 1909 nomor 3546 Pembagian Wilayah *Afdeeling* Sulawesi Tengah.
- Surat Sekretaris Pemerintah Hindia Belanda nomor 2605 tanggal 23 September 1907.
- Volkstelling 1930 Deel V, 1936. *Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, de Kleine Soenda Eilanden en de Molukken*. Batavia: Departement van Economische Zaken.
- Wertheim, W.F., 1956. *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change*, Bandung: Sumur Bandung.
- Yulia, Christina, Fahri, dan Ramadanil. "Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Suku Topo Uma di Desa Oo Parese Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah". *Jurnal Biocelebes*, Vol. 11 No. 2, Desember, 2017.

Yusran, Yusfan Adeputera dan Suryasari, Noviani, “Bolon and Lobo: Revealing The Stack Construction on Batak Simalungun and Kulawi Traditional House, *IACSIT International Journal of Engineering and Technology*, Vol. 8, No. 3, June 2016.